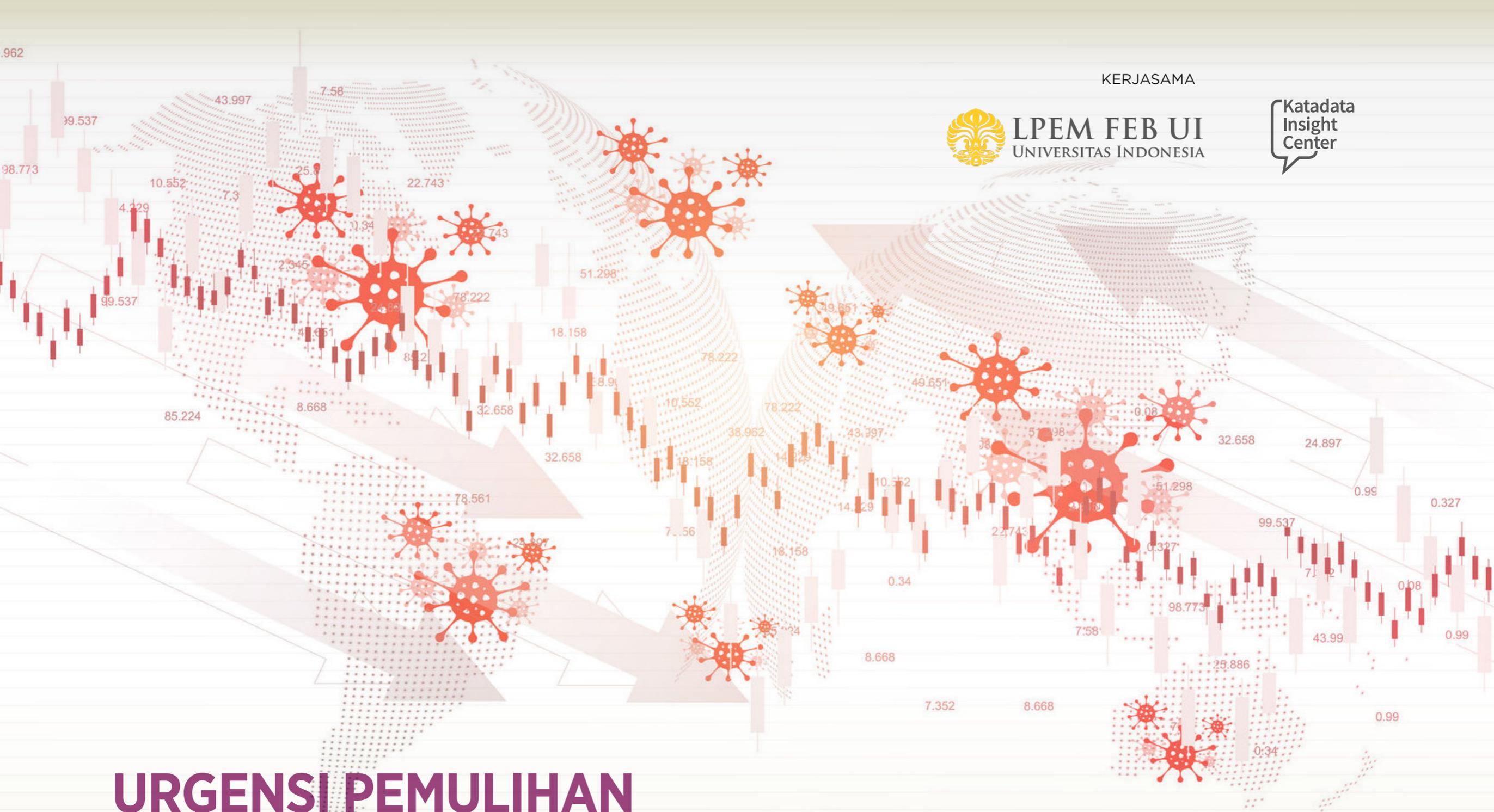


KERJASAMA



LPEM FEB UI
UNIVERSITAS INDONESIA



URGENSI PEMULIHAN EKONOMI BERKELANJUTAN PASCA PANDEMI COVID-19

AGUSTUS 2020

DAFTAR ISI

PENGANTAR	4
Pandemi Hantam Perekonomian Global	6
Menumbangkan Perekonomian Nasional	8
Tingkat Kemiskinan Meningkat Di Masa Pandemi	10
MENGAPA PEMULIHAN BERKELANJUTAN PENTING?	12
Agenda Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi	14
Urgensi Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan	16
STRATEGI KE DEPAN	18
Sektor Prioritas Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan	20
Mendorong Stimulus Fiskal Yang Berdampak Signifikan	22
Mempromosikan Penguatan Pasar Kerja	24
Bantuan Sosial Untuk Pembangunan Berkelanjutan	26
Mengelola Fiskal Dengan Prinsip Berkelanjutan	28

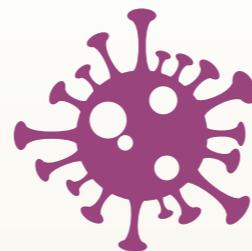


PENGANTAR

Pandemi Covid-19 telah meruntuhkan seluruh sendi kehidupan. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), pandemi telah memicu resesi ekonomi terparah dalam seabad terakhir dan mengakibatkan kerusakan besar pada sektor kesehatan, pekerjaan dan kesejahteraan manusia. Ini membuat seluruh negara harus bertindak cepat untuk menghindari krisis lebih parah.

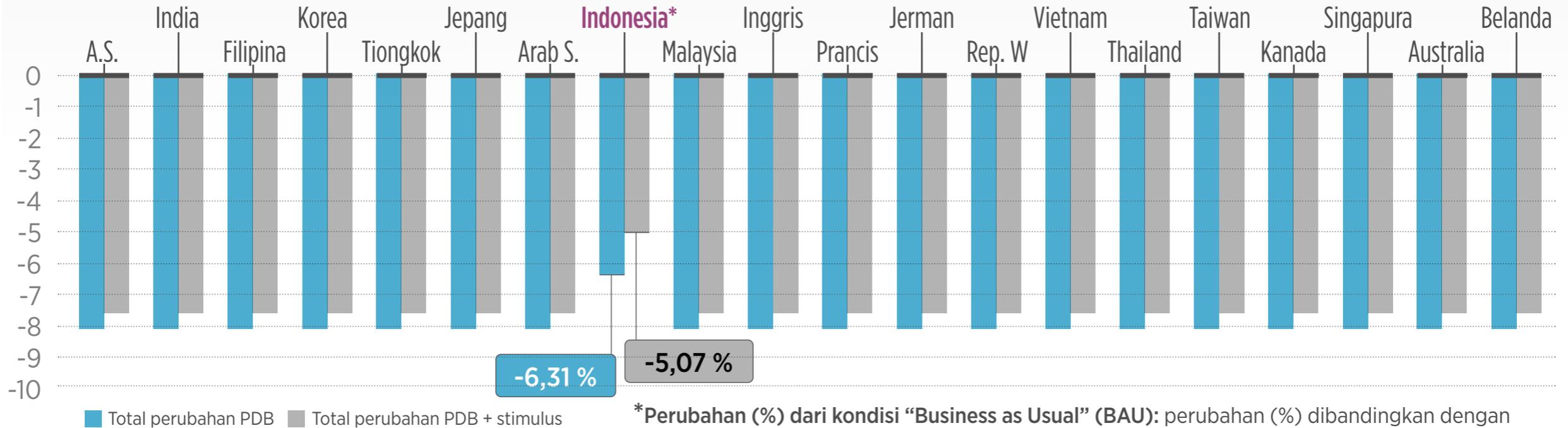
PANDEMI HANTAM PEREKONOMIAN GLOBAL

Pandemi Covid-19 telah meruntuhkan seluruh sendi kehidupan. Menurut OECD, pandemi telah memicu resesi ekonomi terparah dalam seabad terakhir dan mengakibatkan kerusakan besar pada sektor kesehatan, pekerjaan dan kesejahteraan manusia. Ini membuat semua negara harus bertindak cepat untuk menghindari krisis yang lebih parah.



PEREKONOMIAN GLOBAL TERPUKUL

Simulasi perubahan PDB pada negara dengan pemberian stimulus di saat pandemi.

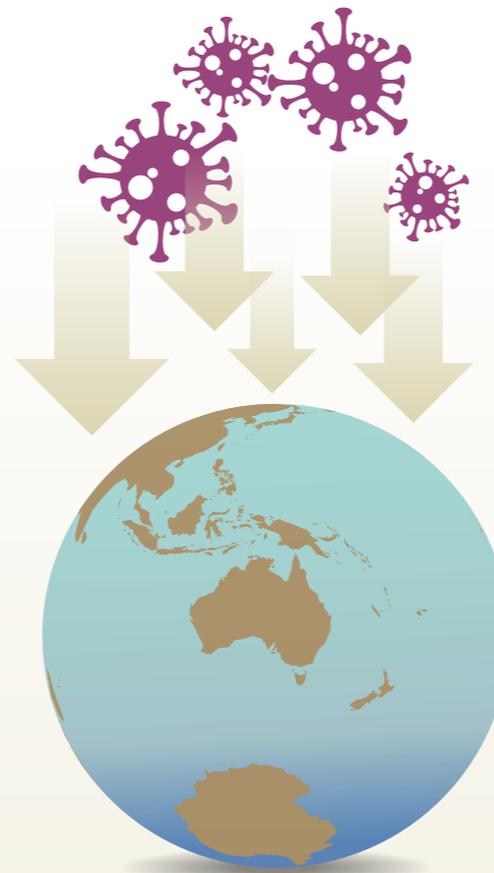


*Perubahan (%) dari kondisi "Business as Usual" (BAU): perubahan (%) dibandingkan dengan kondisi ketika aktivitas perekonomian berjalan seperti biasa, tanpa ada disrupsi.

COVID-19 JADI MUSIBAH DUNIA

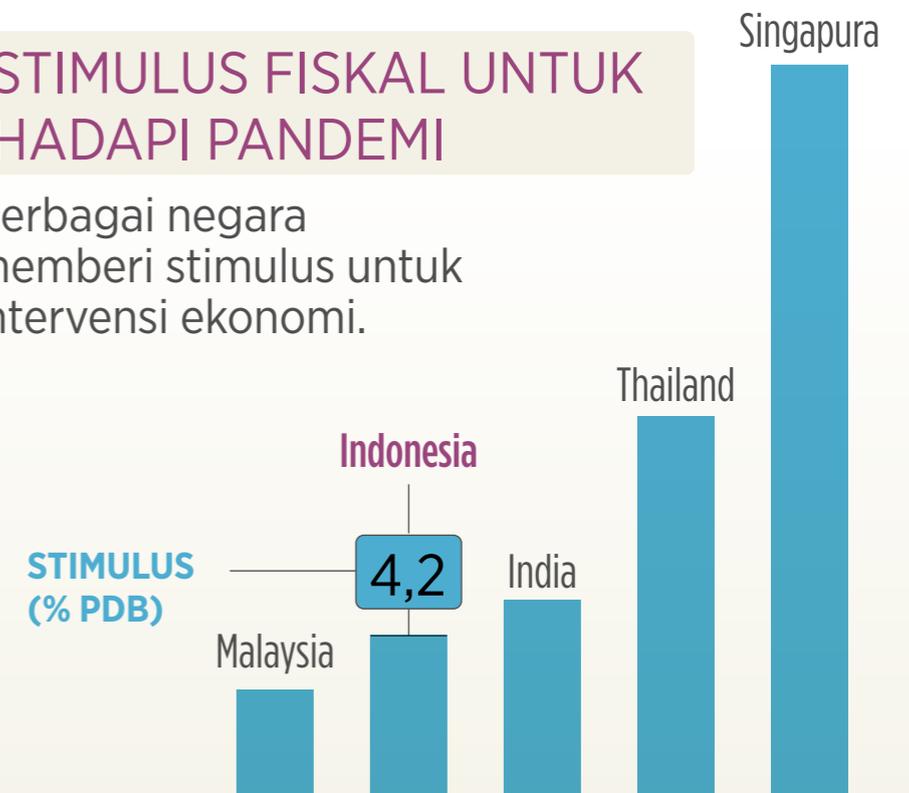
- **22,5 juta** kasus terkonfirmasi.
- **790 ribu** kematian di seluruh dunia.
- **5,2%** kontraksi pertumbuhan ekonomi global.
- **3 kali** penurunan dibandingkan resesi 2009.
- **Scenario double-hit** akan memperpanjang proses pemulihan.
- Minimal **2 tahun** untuk mencapai PDB dunia ke level Q4/2019.

Keterangan:
PDB (Produk Domestik Bruto)
Data Covid per 19 Agustus 2020 (Worldometer)



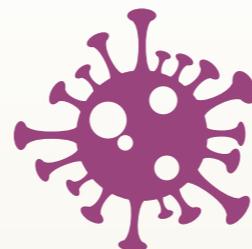
STIMULUS FISKAL UNTUK HADAPI PANDEMI

Berbagai negara memberi stimulus untuk intervensi ekonomi.

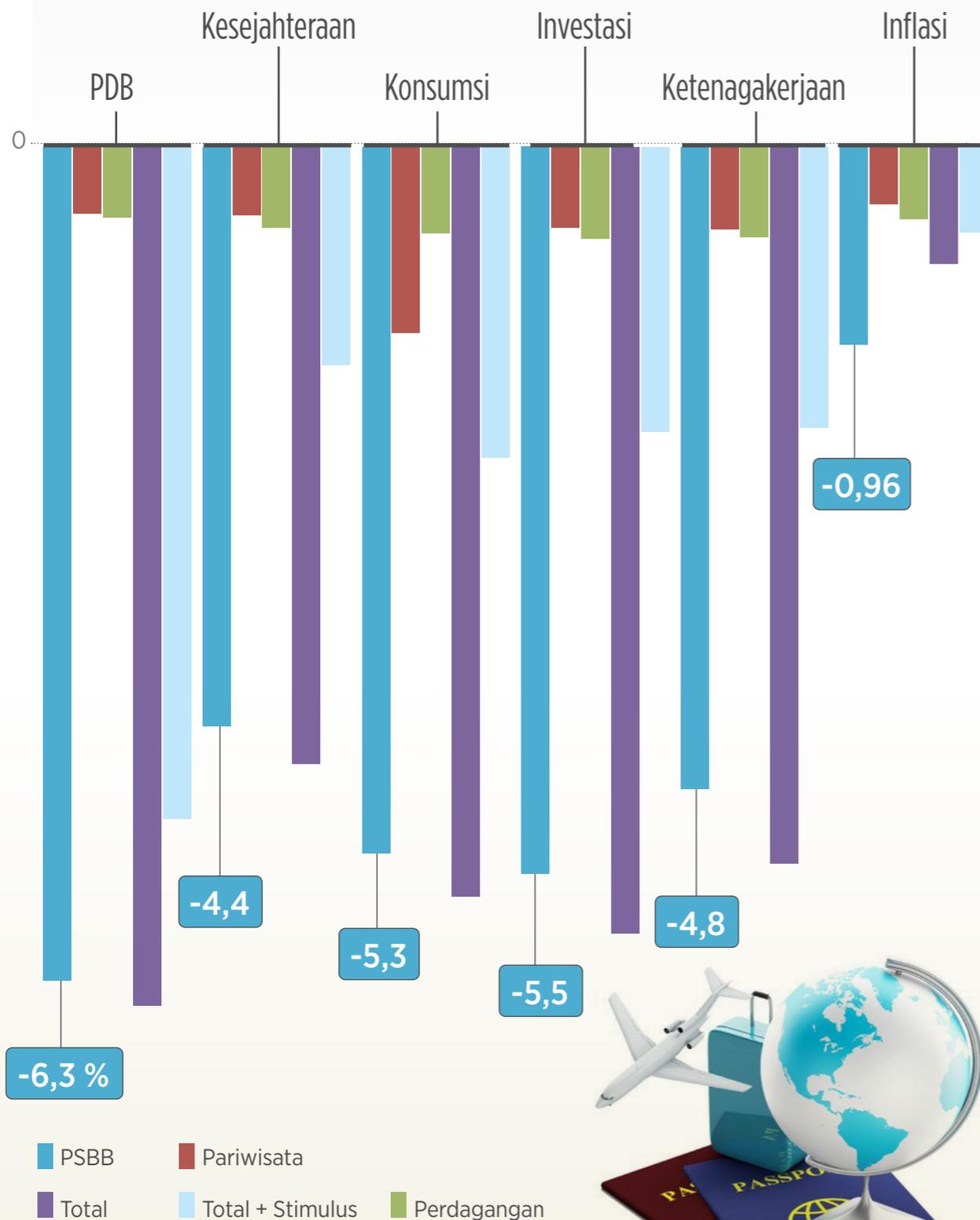


PANDEMI MENUMBANGKAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Seperti negara lainnya, ekonomi Indonesia juga terpukul oleh pandemi Covid-19. Dampak ganda pada sektor ekonomi tercermin pada sejumlah indikator utama makro ekonomi nasional. Untuk mencegah kemungkinan dampak memburuk, pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal di berbagai sektor dan daerah.



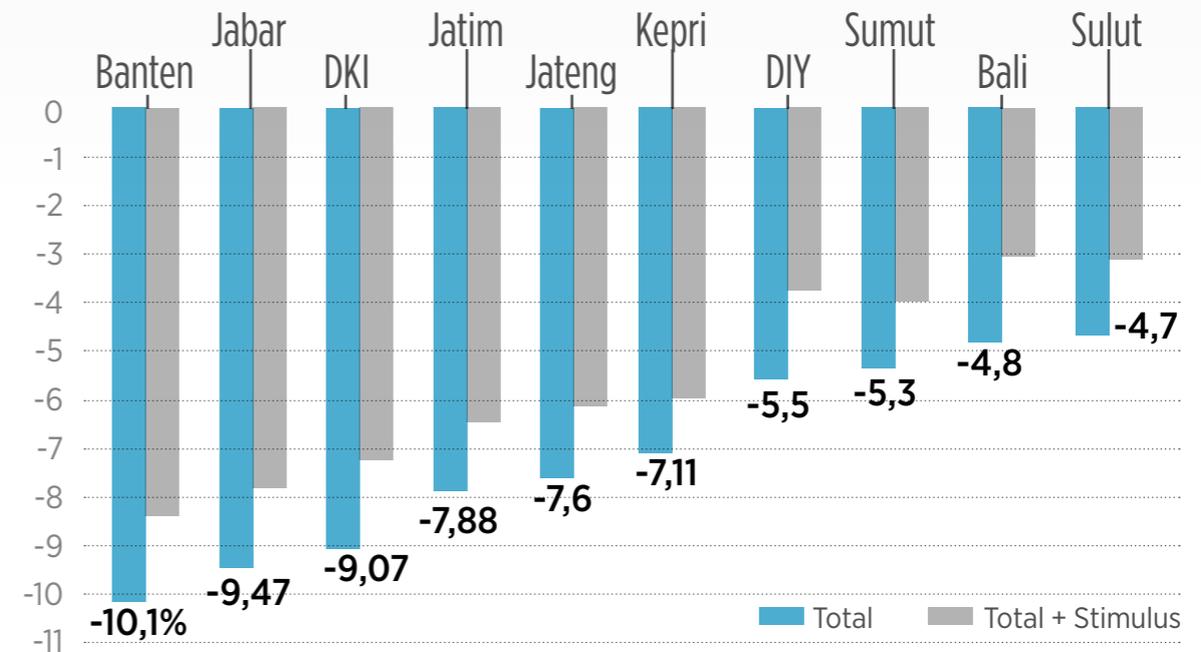
MAKRO EKONOMI TERTEKAN, STIMULUS MENAHAN



SUMBER: HASIL SIMULASI LPEM FEB UI

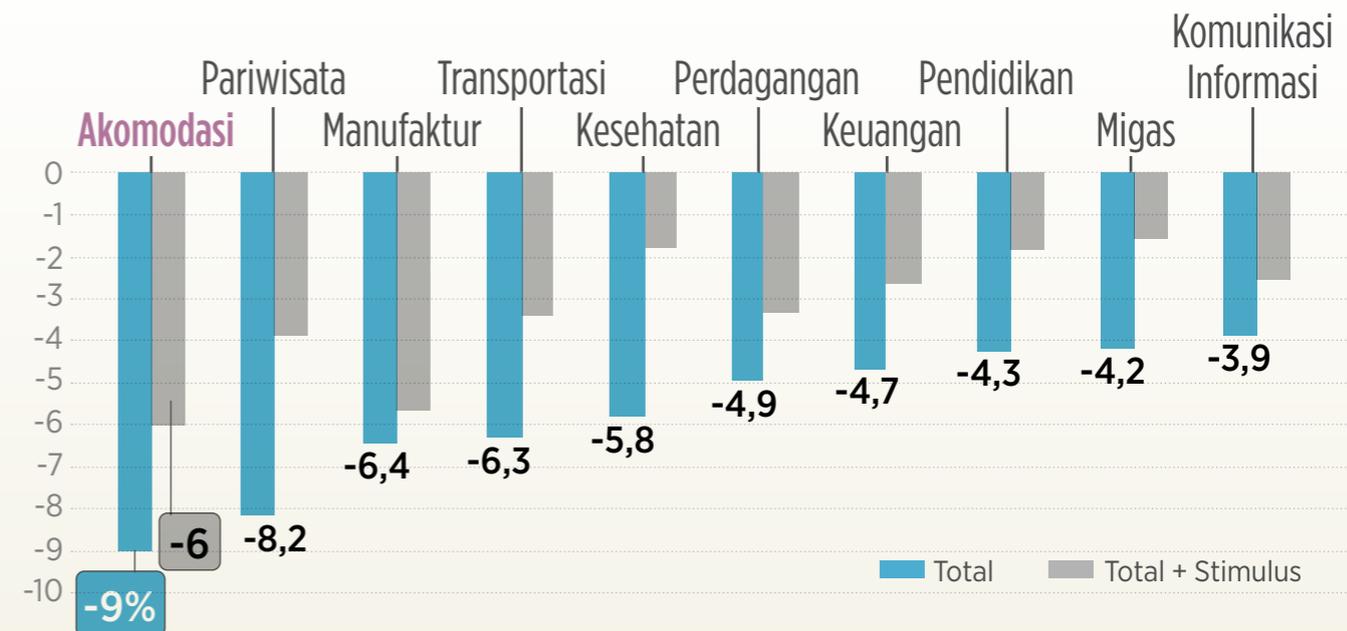
EKONOMI DAERAH MELEMAH

Sentra pariwisata yang padat penduduk menjadi daerah paling terdampak pandemi Covid-19.



STIMULUS, KUNCI PEMULIHAN

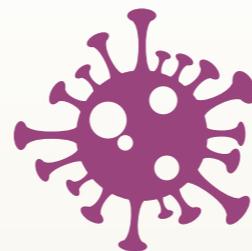
Sektor yang membutuhkan interaksi manusia menjadi bidang paling terdampak.



Seluruh grafik mengindikasikan perubahan (%) dari kondisi "Business as Usual" (BAU)

KEMISKINAN MENINGKAT DI MASA PANDEMI

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada kondisi sosial masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran. Persentase orang miskin yang bekerja di sejumlah sektor penopang ekonomi nasional justru meningkat signifikan. Padahal, sebelum pandemi tingkat kemiskinan sudah tinggi.

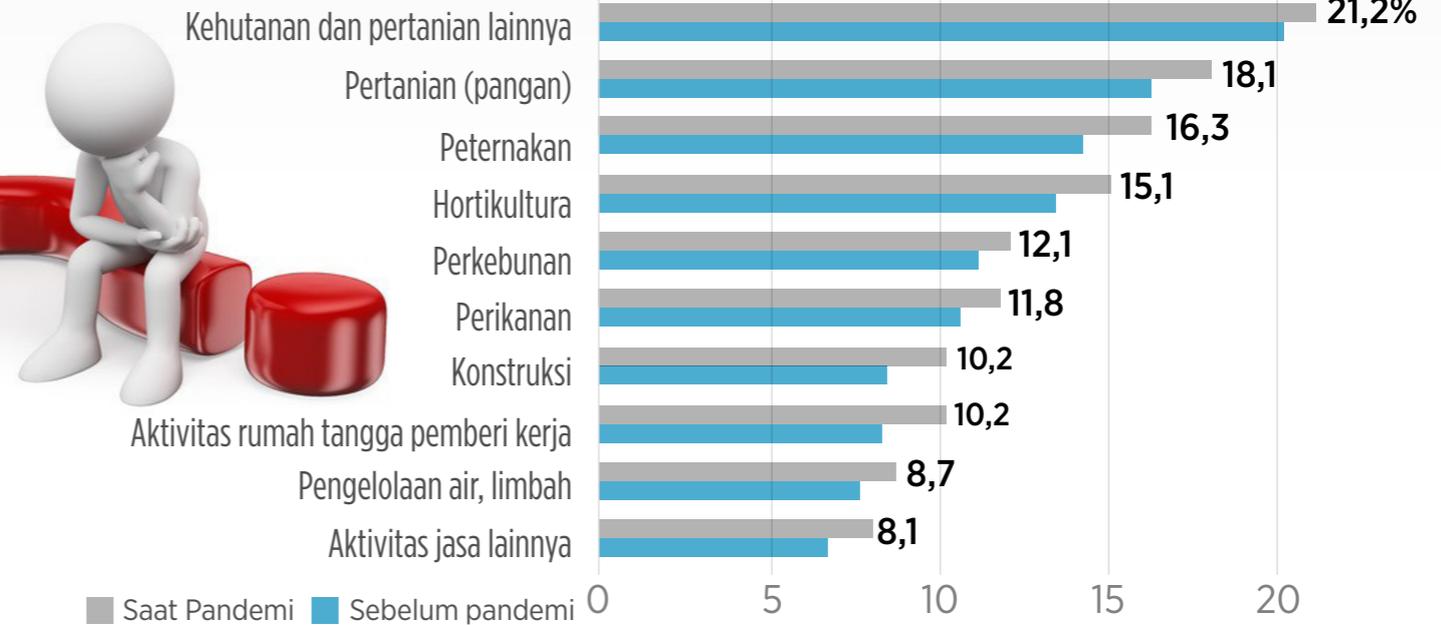


10 SEKTOR DENGAN PENINGKATAN KEMISKINAN TERTINGGI

Peternakan menjadi sektor yang semakin tinggi tingkat kemiskinannya.

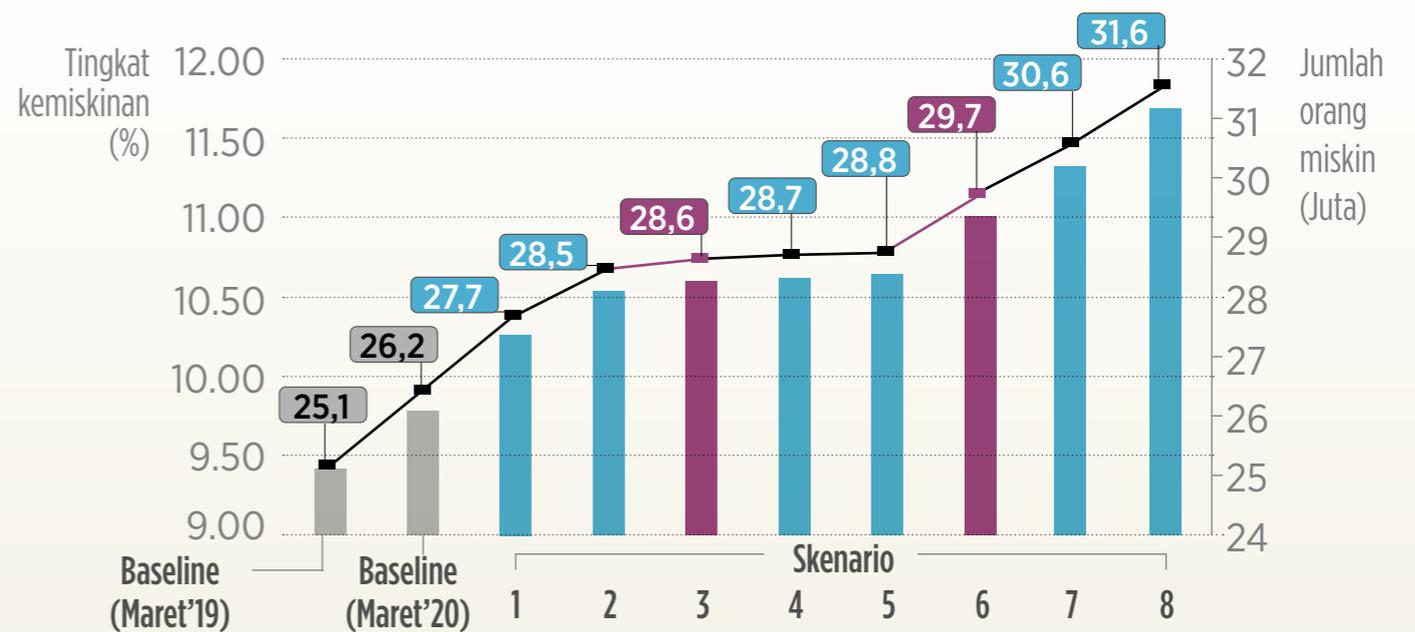


10 SEKTOR DENGAN KEMISKINAN TINGGI SEMAKIN TERDAMPAK



SKENARIO PENINGKATAN ANGKA KEMISKINAN

8 skenario berbasis prediksi pertumbuhan ekonomi sejumlah lembaga.



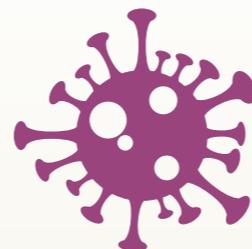


MENGAPA PEMULIHAN BERKELANJUTAN PENTING?

Selain untuk mencegah bencana ekonomi dan kesehatan yang parah, proses pemulihan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan karena setiap krisis lingkungan dapat memicu penyakit menular di masa depan. Pergeseran menuju pembangunan berkelanjutan dan inklusif akan mengurangi dampak bagi lingkungan, mewujudkan ekonomi lebih tangguh, setara dan berkeadilan, serta memperluas lapangan kerja baru.

AGENDA PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI

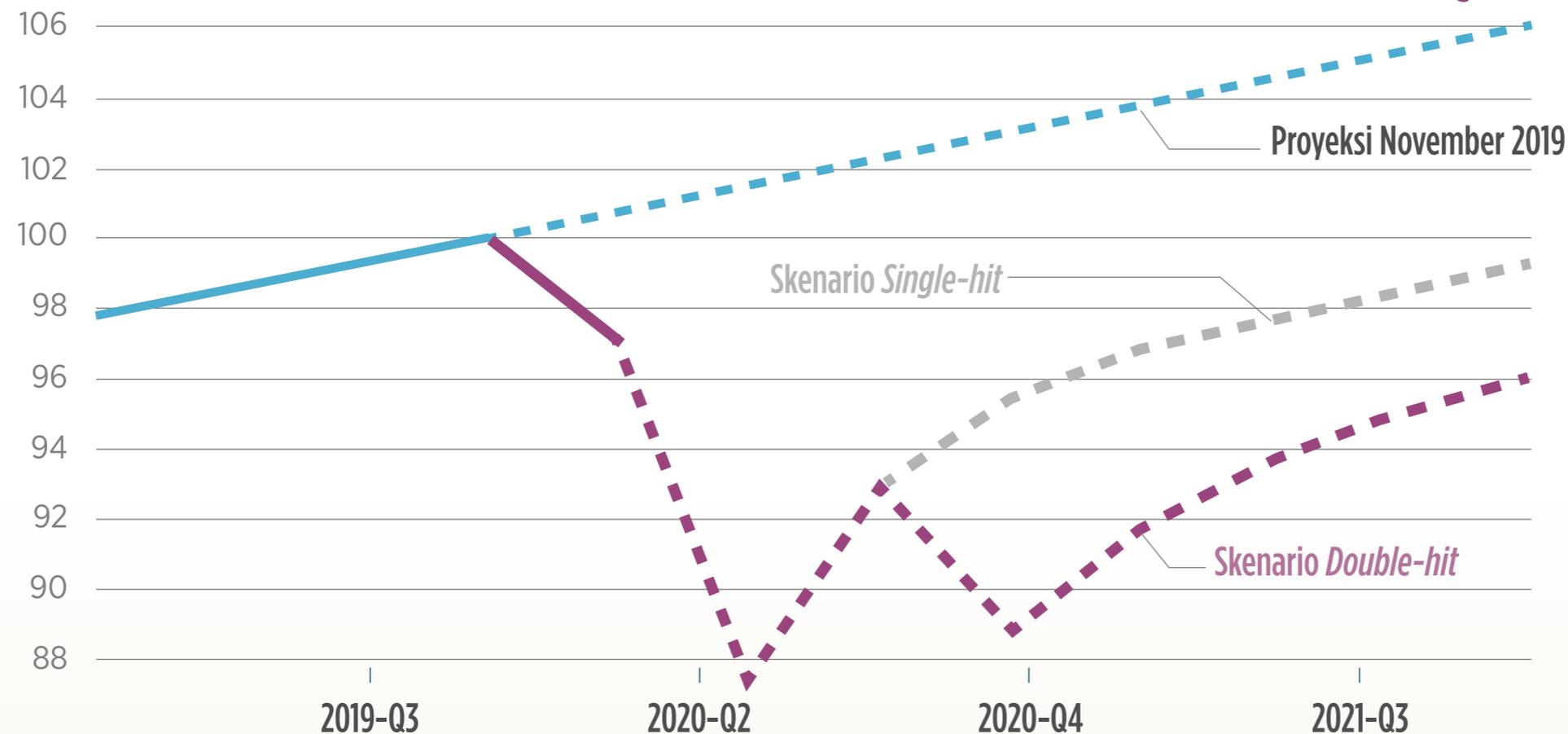
Perkembangan jumlah kasus Covid-19 belum menunjukkan tanda kapan akan berakhir. OECD memperkirakan pemulihan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Kondisi ini menuntut keberpihakan pemerintah terhadap strategi pemulihan berkelanjutan yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).



DUA SKENARIO OECD

Guncangan perekonomian akibat pandemi Covid-19 diikuti pemulihan yang lambat. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi belum kembali ke posisi Q4 2019, setidaknya selama 2 tahun.

World GDP, Index 2019 - Q4 = 100



■ ■ ■ ■ Skenario *Single-hit*, gelombang kedua puncak pandemi bisa dihindari.

Pertumbuhan ekonomi global turun hingga -6% pada 2020.

■ ■ ■ ■ Skenario *Double-hit*, puncak pandemi kedua terjadi sebelum akhir 2020.

Pertumbuhan ekonomi dunia jatuh hingga -7,6% pada 2020, sebelum kembali naik ke 2,8% pada 2021.

KONDISI INDONESIA

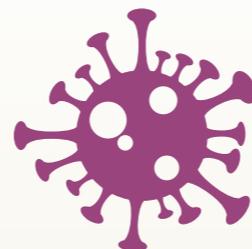
Hingga pertengahan **Agustus 2020**, Indonesia masih di fase “**sedang mengalami pandemi**” atau belum mencapai puncaknya.

Posisi Indonesia berada di ambang batas **resesi ekonomi**.

URGENSI PEMULIHAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Pandemi Covid-19 berdampak bagi peningkatan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan dan potensi kerusakan lingkungan.

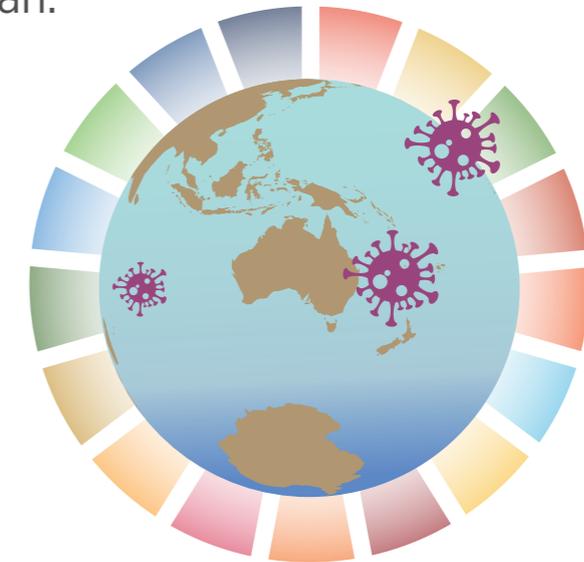
Langkah pemulihan ekonomi menjadi momentum bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga mengurangi risiko krisis dan ancaman penyakit menular di masa depan.



AGENDA SDGs	DAMPAK COVID-19 DI INDONESIA
 Tanpa Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan meningkat • Kelompok rentan terancam
 Tanpa Kelaparan	<ul style="list-style-type: none"> • Rawan pangan • Risiko malnutrisi naik
 Kehidupan Sehat & Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Covid-19 menyebar cepat • Limbah medis melonjak
 Energi Bersih & Terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> • Emisi gas rumah kaca meningkat
 Air Bersih & Sanitasi Layak	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya akses air bersih di daerah rawan Covid-19
 Pekerjaan Layak & Ekonomi Tumbuh	<ul style="list-style-type: none"> • Kebangkrutan meluas • Pengangguran meningkat
 Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan terancam • Potensi polusi saat pemulihan
 Penanganan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen aksi iklim menurun • Pemakaian transportasi pribadi meningkat
 Ekosistem Daratan	<ul style="list-style-type: none"> • Deforestasi • Konversi hutan ke lahan pertanian

APA ITU SDGs?

Kesepakatan pembangunan global pada 2015 yang fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan, serta bertujuan mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan melindungi lingkungan.



PILAR SDGs



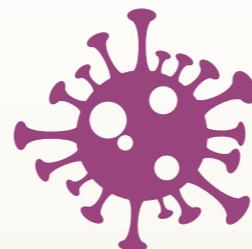


STRATEGI KE DEPAN

Untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca Covid-19, sejumlah langkah perlu diambil pemerintah dan pihak-pihak terkait. Di antaranya adalah menentukan sektor yang menjadi prioritas kebijakan, mempromosikan pasar kerja, menggandakan manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.

SEKTOR PRIORITAS PEMULIHAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Dalam mewujudkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menentukan sektor dan proyek prioritas yang akan menjadi fokus pemerintah pasca pandemi Covid-19. Pemetaan sektor dan proyek prioritas ini penting untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam jangka pendek dan jangka panjang.



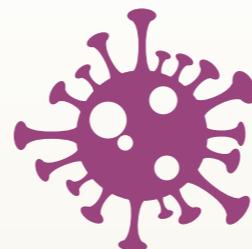
SEKTOR	POIN UTAMA MITIGASI CEPAT HINGGA DI MASA DEPAN								
	JANGKA PENDEK			JANGKA PANJANG					
	Lapangan kerja	Aktivitas ekonomi	Ketepatan Waktu dan Risiko	SDM	Teknologi	Modal fisik	Modal Budaya	Pertumbuhan berkelanjutan	Kapasitas memperkuat ketahanan
SEKTOR PRIORITAS									
Pertanian pangan Dukung ketahanan pangan									
Kelapa sawit berkelanjutan Ketahanan energi dan meminimalisir risiko lingkungan									
Hasil hutan untuk bahan baku farmasi dan obat herbal									
Perhutanan sosial Pengelolaan hutan lestari									
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (atap rumah) dan efisiensi energi Hadirkan bauran energi bersih & efisien									
PROYEK INFRASTRUKTUR									
Pengelolaan limbah berkelanjutan Daur ulang limbah medis & elektronik									
Air dan sanitasi									
Teknologi Informasi & Komunikasi Pendidikan berkeadilan & pertumbuhan ekonomi lokal									
Transportasi publik									
Restorasi gambut									
Restorasi sungai tercemar									
Infrastruktur mitigasi bencana									

Ket: Tidak memenuhi kriteria keberlanjutan
 Memenuhi kriteria keberlanjutan

Mengacu pada European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Environmental and Social Risk Categorization.

MENDORONG STIMULUS FISKAL YANG BERDAMPAK SIGNIFIKAN

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, baik untuk menangani kondisi sosial ekonomi masyarakat, memulihkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara. Agar berdampak signifikan, stimulus fiskal juga perlu diarahkan untuk sektor-sektor yang memiliki dampak berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan.



**FOKUS
STIMULUS
FISKAL KE
DEPAN**



Untuk UMKM
karena menyerap
banyak pekerja
dan mengurangi
ketimpangan.



**Untuk program hijau
dan berkelanjutan**
karena menyerap
banyak pekerja
& minim risiko
lingkungan.

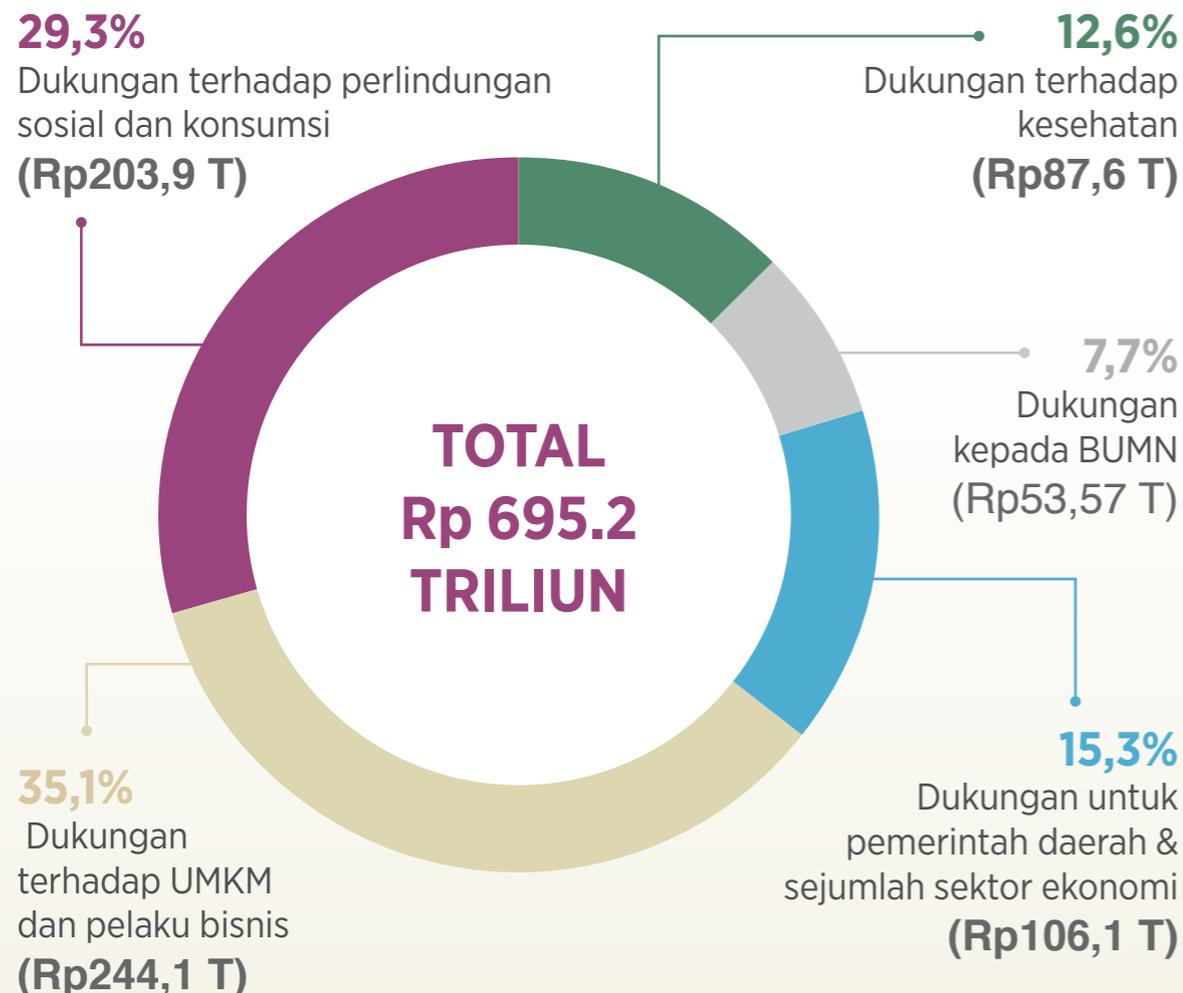


Memperketat
persyaratan kredit
**untuk sektor berisiko
bagi lingkungan.**



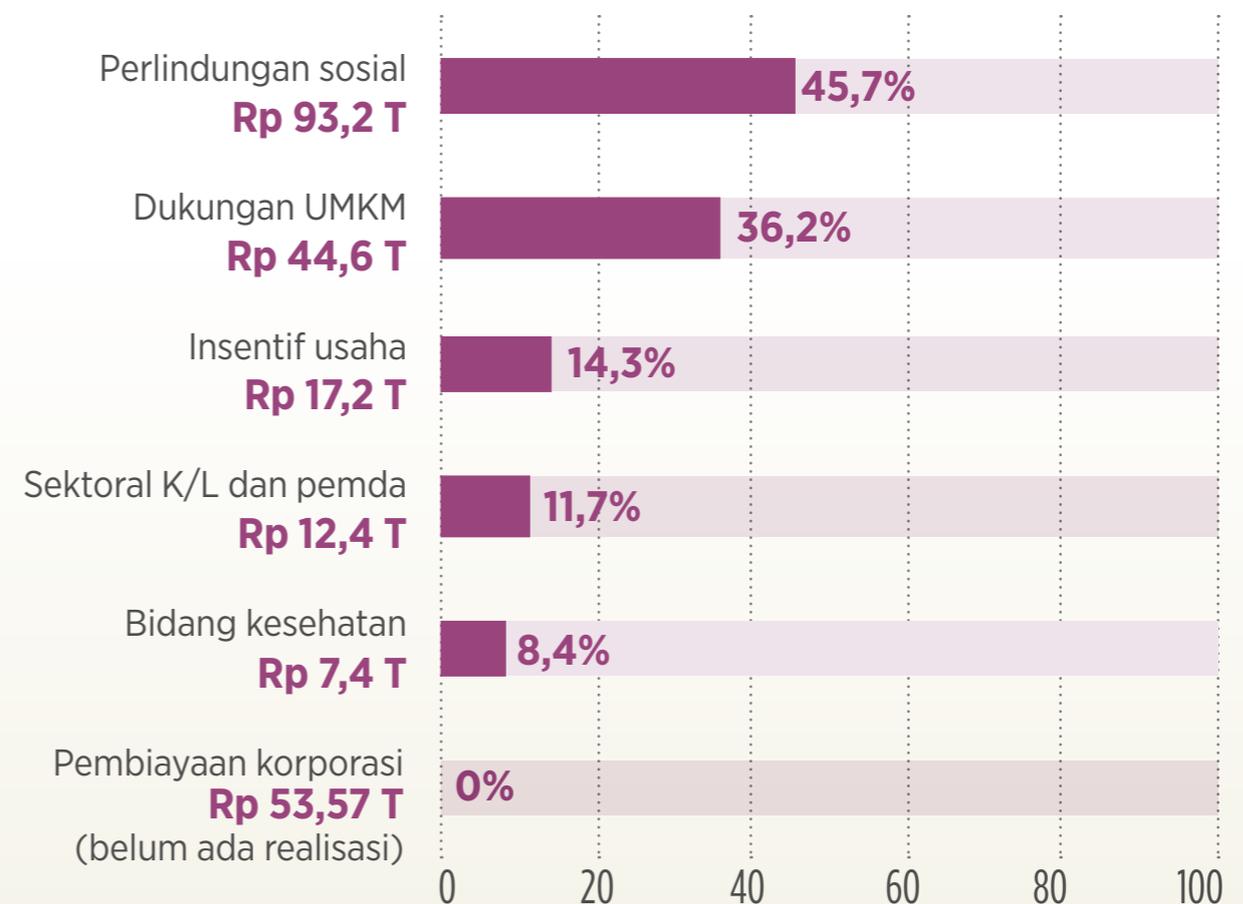
Realokasi anggaran
belanja pemerintah
ke **sektor prioritas.**

ALOKASI ANGGARAN STIMULUS FISKAL



REALISASI STIMULUS FISKAL

(Per pekan pertama Agustus 2020)



MEMPROMOSIKAN PENGUATAN PASAR KERJA

International Labor Organization (ILO) menyebutkan bahwa krisis selalu memberikan dampak dramatis kepada tenaga kerja dimana pun, termasuk Indonesia. Pemerintah sudah mengambil langkah guna membantu para pekerja terdampak pandemi. Namun, perlu penyempurnaan dan upaya lain untuk melindungi pekerja agar tidak terjatuh dalam kemiskinan, bahkan sulit mendapatkan pekerjaan kembali.



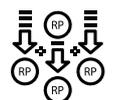
MEMPROMOSIKAN PASAR KERJA

SISI PERMINTAAN

Mendorong perusahaan tetap beroperasi namun pekerja dilindungi



Insentif pajak UMKM & industri lain



Menekan biaya perusahaan agar bisa beroperasi



Kontrak kerja yang lebih aman



Perlindungan sosial bagi pekerja (BPJS)

SISI PENAWARAN

Meningkatkan keterampilan & kemampuan adaptasi pekerja



Pelatihan dan pendidikan pekerja



Akses pendidikan diperluas dari SMA ke atas, lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



Literasi pendidikan



Kartu prakerja dan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK)

MENYEMPURNAKAN KARTU PRAKERJA

Program pendidikan dan pelatihan pekerja & pengangguran, perlu dikembangkan:

- Perbaiki kategori siapa yang paling layak mendaftar
- Perjelas definisi & cakupan pengangguran yang dibidik
- Perjelas durasi (pelatihan, beasiswa & pendampingan)
- Sempurnakan sistem *database*
- Perluas sarana pelatihan, *online* dan *offline*
- - Kaitkan jenis pelatihan dengan kebutuhan keterampilan
- - Platform yang menghubungkan peserta dengan pelaku usaha

FENOMENA PENURUNAN JAM KERJA



14% jam kerja berkurang secara global selama kuartal II/2020

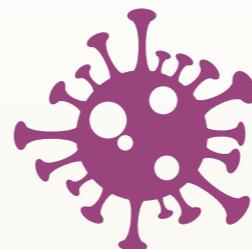
setara dengan



hilangnya **400 juta** pekerjaan penuh waktu.
ILO, 30 Juni 2020

BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan dari dampak adanya pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos). Bantuan diberikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga terdampak dan Program Keluarga Harapan. Untuk memastikan adanya manfaat ganda (*co-benefit*) dari bantuan sosial, dapat ditambahkan persyaratan yang perlu dipenuhi oleh penerima manfaat bansos yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.



PERSYARATAN TAMBAHAN BANTUAN SOSIAL

Untuk memastikan permasalahan sosial dan lingkungan teratasi, persyaratan (*conditionality*) dapat diterapkan untuk berbagai bantuan sosial yang diberikan baik di tingkat rumah tangga maupun desa (aksi kolektif).

Persyaratan yang dapat diterapkan diantaranya:

- Tidak melakukan *illegal fishing* dan *illegal logging*
- Pengelolaan sampah berkelanjutan
- Memastikan anak bersekolah dengan baik
- Merencanakan keuangan keluarga dengan baik



BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL

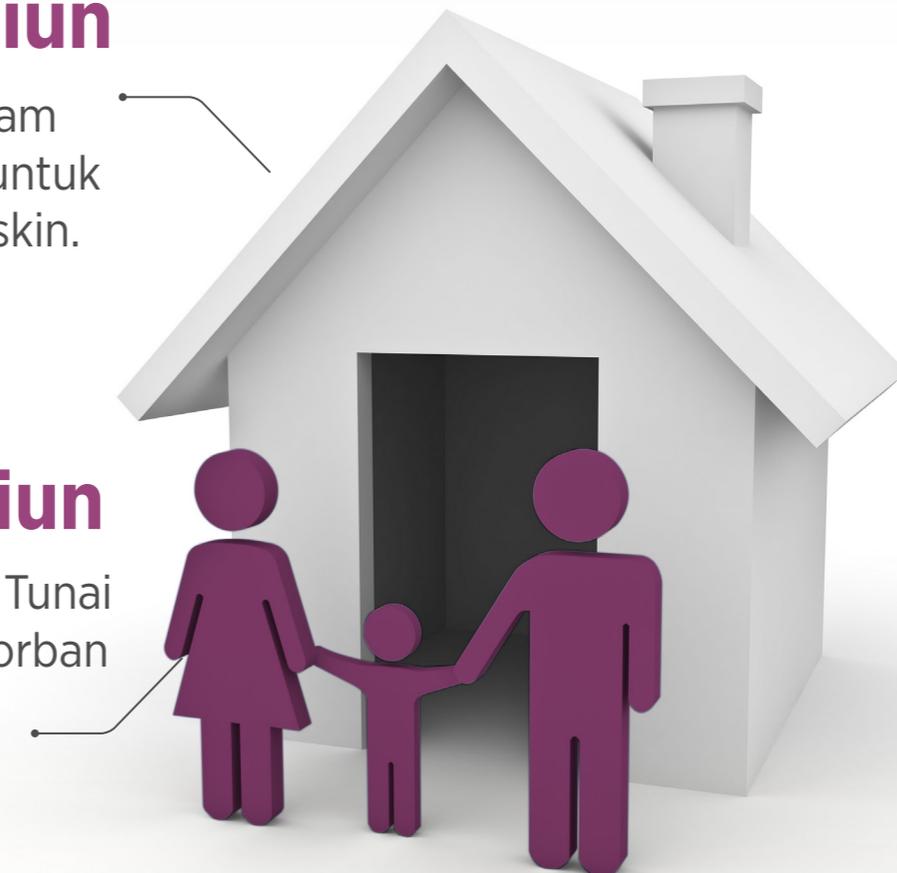
Dana bantuan sosial sudah mencakup rumah tangga miskin hingga akhir 2020.

Rp 37,4 triliun

Alokasi dana Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga miskin.

Rp 31,8 triliun

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk korban terdampak.



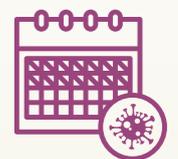
TANTANGAN



Pembaruan data



Bermitra dengan swasta



Risiko waktu pandemi yang lebih panjang



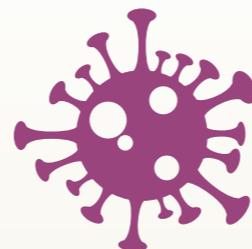
Pemantauan & evaluasi



Melibatkan fasilitator

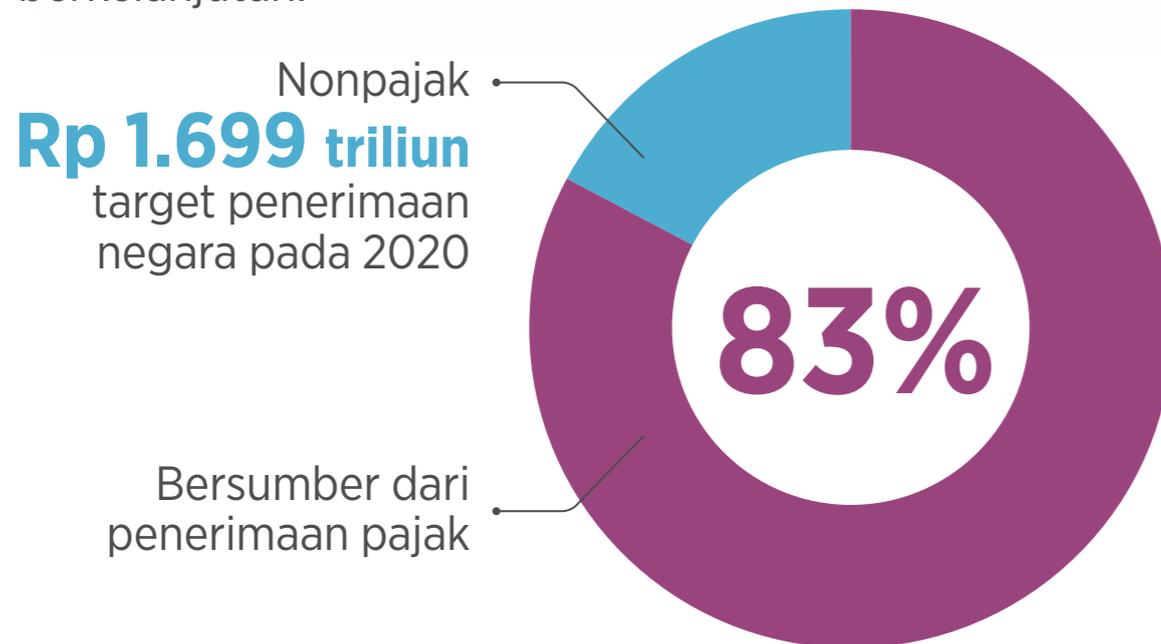
MENGELOLA FISKAL DENGAN PRINSIP BERKELANJUTAN

Dalam pengelolaan fiskal ke depan, pemerintah perlu menggali sumber-sumber pendapatan dan pendanaan baru yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Bersumber dari tambahan pendapatan dari inovasi pendanaan hijau dan efisiensi belanja negara, pemerintah bisa menjalankan stimulus fiskal babak berikutnya.



PENDAPATAN NEGARA

Menggali sumber pendapatan dari sektor berbasis sumber daya alam (SDA) dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengelola SDA yang lebih berkelanjutan.

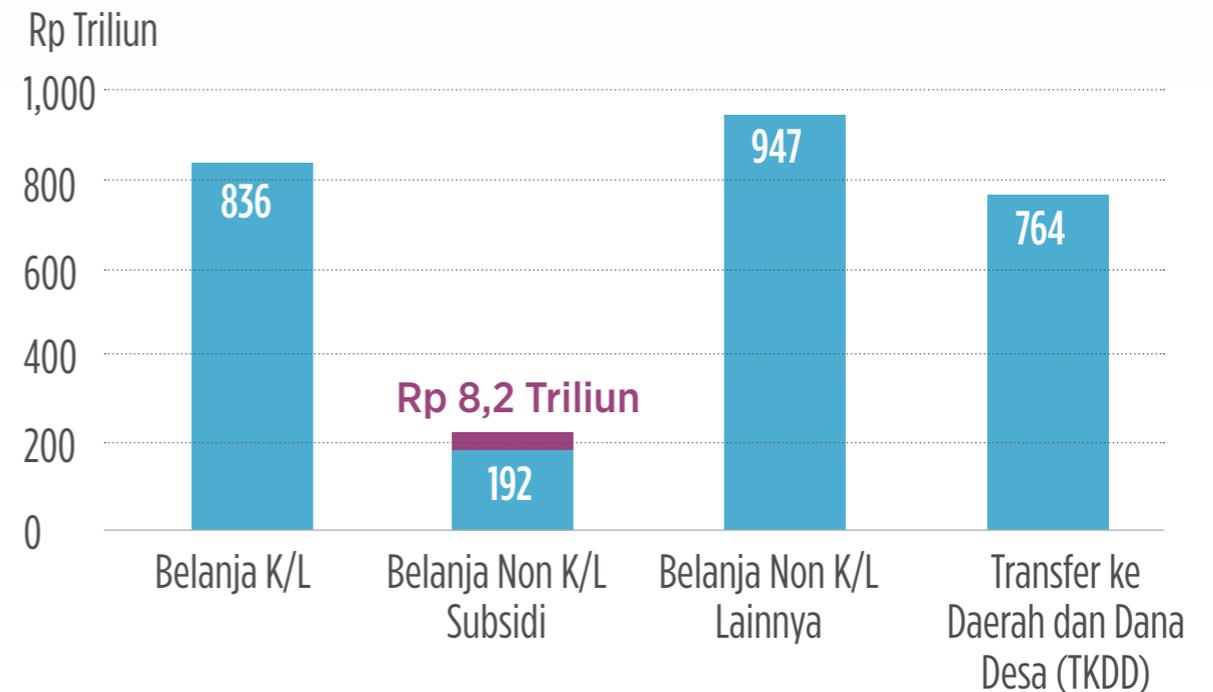


POTENSI PENAMBAHAN PENDAPATAN DAN ALTERNATIF PENDANAAN

- Pajak tambahan di sektor eksplorasi SDA akan menambah **6,2%** dari total penerimaan pajak.
- Inovasi pendanaan hijau untuk mendanai proyek ramah lingkungan dan pengendalian perubahan iklim.
- Menerbitkan *green bonds*, *green sukuk*, dan *social bonds*.
- Memanfaatkan instrumen *debt for climate swaps* dan *sovereign wealth fund*.
- Pendanaan hijau untuk UMKM.

BELANJA NEGARA

Pemulihan pasca pandemi menuntut pemerintah mengalokasikan pengeluaran lebih baik dan efektif.



ALTERNATIF EFISIENSI BELANJA

- Dengan skenario **20%** pengurangan subsidi BBM & LPG, penghematan anggaran bisa mencapai **Rp 8,2 triliun**.
- Penghematan bisa lebih besar dengan memangkas belanja K/L, seperti mengganti biaya perjalanan dinas dengan rapat virtual.



BERDASARKAN HASIL STUDI



NASKAH DAN VISUAL



AGUSTUS 2020